

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Cirebon adalah kota yang berada di provinsi Jawa Barat. Cirebon memiliki kebudayaan yang khas, salah satunya kebudayaan yang masih diperlihara adalah batik. Batik Trusmi merupakan salah satu batik yang sangat terkenal di Indonesia yang merupakan khas Cirebon. Batik Trusmi pertama kali dikembangkan di keraton Cirebon dalam pimpinan kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. Lokasi pembuatannya terpusat di kecamatan Plered, sekitar empat kilometer di sebelah barat pusat kota Cirebon, Jawa Barat. Kepopuleran ini membuat daerah asalnya mendapatkan julukan kampung batik Trusmi. Trusmi merupakan salah satu desa wisata batik, di sana banyak berdiri pertokoan batik. Keindahan batik Trusmi akan batik yang bernuansa pesisir serta warna-warna yang bervariasi membuat batik Trusmi memiliki penggemarnya sendiri. Tempatnya yang strategis karena dilewati jalan pantura membuat Trusmi sangat cocok untuk dijadikan tempat untuk membeli buah tangan. (Habibi, 2016)

Batik Trusmi merupakan khas Cirebon yang memiliki daya tarik tersendiri. Batik Trusmi termasuk dalam kategori batik pesisir karena lokasi geografis Kota Cirebon. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa. Secara etimologi kata batik diambil dari kata *ambatik* yaitu gabungan dari kata *amba* dalam bahasa Jawa yang

berarti menulis dan *tik* yang berarti titik kecil, tetesan, atau membuat titik. Jadi, batik adalah menulis atau melukis titik. Kampung batik Trusmi merupakan jantung produksi batik Cirebon.

*Collaborative Governance* dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah publik dengan melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian masalah (Lloyd et al., 2012)

Di tengah maraknya era globalisasi, sebuah budaya diharapkan mampu beradaptasi agar tidak tergerus oleh zaman yang kecanggihannya semakin maju dan menimbulkan perubahan perilaku, hingga perubahan gaya berpakaian masyarakatnya. Salah satu budaya warisan nusantara yang masih ada di era globalisasi adalah batik, yang merupakan sebuah corak atau gambar pada kain, serta setiap daerah memiliki motif dan keunikannya sendiri. Batik menjadi salah satu budaya yang mampu bertahan dan eksis di masyarakat yang berteknologi.

Bahkan, batik telah ditetapkan sebagai *Indonesian Cultural Heritage*, yaitu warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. yang kemudian pada tanggal tersebut ditetapkan menjadi Hari Batik Nasional. Peringatan hari Batik biasanya diperingati dengan penganjuran penggunaan Batik bagi seluruh kalangan masyarakat. Pengakuan UNESCO tersebut juga mampu meningkatkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya agar tidak punah ataupun diklaim Negara lain.

Trusmi merupakan sentral industri batik yang ada di Cirebon. Perkembangan industri batik yang ada di Cirebon ini sudah sangat berkembang, hal ini dilihat dari banyaknya *showroom- showroom* baru yang bermunculan di daerah Panembahan, Trusmi dan juga Plered. (Wahyuningsih & Fauziah, 2016)

Di era globalisasi saat ini adanya pengaruh positif dan negative bagi batik di nusantara. Pengaruh positifnya ialah batik semakin dikenal oleh masyarakat luas, termasuk dunia internasional. Sedangkan pengaruh negatifnya, batik dapat tergerus di tengah era globalisasi. Batik trusmi menjadi salah satu produk khas Cirebon, Indonesia yang dikenal di era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, perlunya upaya agar batik Trusmi dapat bersaing di era globalisasi dan terus dilestarikan.

Salah satu produk local dalam industry tekstil khas Indonesia salah satunya batik Trusmi. Dalam industry batik saat ini menghadapi beberapa masalah dari segi pemasaran dan penjualan setelah adanya pandemi covid-19. Banyak pelaku usaha batik Trusmi dan pengerajin yang berhenti usahanya dan produksinya akibat hal tersebut, sehingga para pelaku usaha dan pengerajin memulai dari awal lagi untuk menjalankan usaha dan produksinya. Oleh karena itu, perlunya upaya mengatasi persoalan tersebut, seperti perlunya membuka pasar yang menarik minat pengunjung, serta pemerintah diperlukan dalam memberikan dukungan kepada produsen batik,

perlunya melibatkan para generasi muda dalam kesenian batik. Sehingga pelestarian batik yang berkembang akan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

Batik yang merupakan sebagai warisan budaya mengungkapkan ciri khas Negara Indonesia. Akan tetapi, kesadaran untuk melestarikan dan menjaga keaslian budaya dalam negeri masih sebelah mata oleh para masyarakat.

Batik Trusmi merupakan karya budaya yang keberadaannya sampai sekarang masih diterima oleh masyarakat. Sebagian besar pengrajin batik Trusmi yang ada di kecamatan Plered Kabupaten Cirebon kini masih bertahan, walaupun produk yang dihasilkan mengalami pasang surut. (Wahyuningsih & Fauziah, 2016)

Dalam kebijakan mengembangkan batik Trusmi dengan menyongsong produktifitas batik ke ranah nasional dan internasional. Pemberdayaan dan pembangunan dilakukan oleh pemerintah kabupaten Cirebon untuk mendukung hal tersebut. Pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat diwujudkan dengan bentuk pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu bentuk pembangunan berkelanjutan ialah pemberdayaan masyarakat, pembangunan suatu daerah dilakukan guna memberdayakan potensi, kemampuan, dan sumber daya manusia. (Hawa et al., 2022)

Menurut Data Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Cirebon, Industri batik berkembang di kawasan Trusmi, Kecamatan Plered dengan jumlah pengusaha yang tercatat saat ini sebanyak 539 Unit usaha, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4.628 orang, nilai investasi sekitar Rp 14.003.094.000 dan kapasitas produksi mencapai 42.024 kodi pertahun. Pemerintah kabupaten Cirebon telah membangun sentra batik Trusmi yang memiliki 190 kios.

Data total pengrajin batik Trusmi dikabupaten Cirebon menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak lebih dari 1000 orang dan dipelopori oleh kelompok batik Trusmi. Pengrajin tersebut berasal dari desa Trusmi. Menjual kerajinan batik berupa baju, selendang, aksesoris, dan kerajinan lainnya yang bernuansa batik.

Menurut Data Dinas Pariwisata dan Budaya pengunjung Batik Cirebon memiliki jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 1.423 sedangkan wisatawan nusantara sebanyak 1.354.722. Salah satu tempat wisata di Cirebon yang dilirik wisatawan nusantara maupun mancanegara karena dinilai unik dan memiliki nilai budaya adalah Kawasan Wisata Batik Trusmi Cirebon. Pembuatan Kawasan Wisata Batik Trusmi Cirebon mulanya bertujuan untuk memberdayakan pengrajin rumahan sekaligus mengenalkan kearifan lokal kota Cirebon dan meningkatkan niat berkunjung masyarakat terhadap kota Cirebon. Jam operasional kawasan wisata batik Trusmi Cirebon mulai pukul 09.00 WIB hingga 19.00 WIB. Namun, biasanya lokasi

ini ramai di pagi hari kawasan wisata batik Trusmi yang terletak di Jalan Trusmi No 148, Plered, kabupaten Cirebon.

Dinas Pariwisata dan Budaya sebagai upaya dalam pengembangan industry di Kabupaten Cirebon. Di era otonomi daerah ini industri pariwisata menjadi wujud untuk memajukan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar daerah pariwisata. Selain itu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) suatu daerah serta pemasukan terhadap devisa negara. (Fabiana, 2019)

Kebijakan pemerintah dalam melestarikan batik yaitu perlindungan Hak cipta atas seni batik dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf I dan pasal 10 ayat (2).

Untuk seni batik yang dilindungi pada pasal 12 ayat (1) adalah hak ciptaan motif batik kontemporer atau kreasi yang dibuat secara konvensional yang memenuhi syarat antara lain bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian.

Selanjutnya, seni batik yang dilindungi pada pasal 10 ayat (2) adalah motif batik tradisional yang merupakan suatu kebudayaan yang tersebar dan diwariskan secara turun-menurun, memiliki nilai-nilai dan identitas suatu social dan budaya yang digunakan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan pendokumentasian atas motif-motif batik Cirebon. Upaya tersebut untuk melindungi motif tradisional batik Trusmi. Dokumentasi tersebut dilakukan dalam rangka pelestarian warisan budaya masyarakat local yang hidup dan berkembang secara alamiah, yang dapat membuktikan bahwa suatu warisan budaya tertentu memang berasal dan menjadi bagian dari kehidupan social.

*Collaborative governance* dalam mengembangkan pelestarian batik Trusmi di kabupaten Cirebon dimaksud untuk menjaga suatu kearifan local yang bisa diciptakan untuk mengembangkannya. Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam melestarikan batik trusmi di kabupaten Cirebon yaitu kolaborasi antara pemerintah, *sector swasta* serta masyarakat untuk menjaga serta melindungi batik Trusmi.

Dengan adanya sekian *stakeholder* yang terlibat dalam pelestarian batik Ttrusmi di Kabupaten Cirebon, seperti pemerintah, pelaku usaha, pengrajin dan masyarakat. Di harapkan dapat mengangkat harkat para pelaku usaha, pengrajin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pelestarian batik Trusmi terus berkembang.

Pemerintah, yang memiliki peran yang sangat penting serta tanggungjawab yang besar dalam mengeluarkan kebijakan terhadap program-program yang akan dikembangkan diwilayah Cirebon dalam bentuk melestarikan batik Trusmi dikabupaten Cirebon, Selanjutnya *Sector swasta*, seperti pelaku usaha batik,

pengerajin batik yang juga kehadirannya ditengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari usaha mereka dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari batik Trusmi. dan Masyarakat yang mempunyai peran mendukung program pemerintah dan para pelaku usaha batik Trusmi dengan cara membeli, mempromosikan dan melestarikan batik Trusmi. karena batik mempunyai nilai tinggi serta sejarah tradisi dari bangsa Indonesia, dan merupakan warisan kebudayaan Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Collaborative Governance Dalam Pelestarian Batik Trusmi Di Kabupaten Cirebon***”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menentukan permasalahan utama yang menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut adalah:

Bagaimana *Collaborative governance* dalam melestarikan batik trusmi di kabupaten Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana *Collaborative governance* dalam melestarikan batik Trusmi dikabupaten Cirebon.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Manfaat penelitian secara Teoritis dan Praktis sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang *Collaborative governance*.
- b. Sebagai bahan refrensi bagi peneliti lain yang berminat meneliti permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Akademisi:

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan *Collaborative Governance*.

- b. Bagi Pemerintah:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi pemerintah kabupaten Cirebon serta pemerintah lainnya yang ada di Indonesia terkait bagaimana upaya dalam pelestarian batik trusmi yang bermanfaat untuk masyarakat.

c. Bagi Masyarakat:

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan tentang melestarikan batik Trusmi sebagai kekayaan budaya.

### **3. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini bukan pertama kali dilakukan oleh peneliti, melainkan sudah banyak penelitian yang dilakukan. Dari beberapa penelitian yang mengangkat tema mengenai *Collaborative Governance*, perlunya ada perbandingan atau penyesuaian agar mampu meningkatkan kembali kualitas penulisan yang ada. Beberapa penelitian sebelumnya terdapat kelebihan yang dapat dijadikan bahan acuan penulis. Penjelasan hasil penelitian sebagai berikut:

### 1.1 Tabel Literature Review

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Bagus Nuari Harmawan, 2017	<i>Collaborative Governance</i> dalam program pengembangan nilai budaya daerah melalui banyuwangi Ethno carnival	Hasil penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa proses <i>Collaborative Governance</i> kerjasama yang terjalin antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Manajemen Jember Fashion Carnival dan Dewan Kesenian Blambangan terjalin melalui beberapa tahapan seperti dialog tatap muka, membangun <i>trust</i> , menjalin komitmen, membangun kesepahaman bersama hingga menghasilkan output kerjasama.
2	Devi Arianti, dan Lena Satlita, 2018	<i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan konservasi mangrove baros di desa tirtohargo kecamatan kretek kabupaten bantul.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam proses <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan konservasi mangrove baros dilakukan dengan konsep <i>agro silvo dishery</i> sudah dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
3	Ahmad Sururi, 2018.	<i>Collaborative Governance</i> sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (studi revitalisasi kawasan wisata cagar budaya banten lama)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum kerjasama yang dibentuk berdasarkan SK kesutanan ternate. Nilai yang mendasari kesultanan ternate dalam penyelenggaraan <i>Legu Gam</i> adalah untuk melestarikan adat seatorangin dalam kehidupan sehari-hari di tengah mudarnya nilai-nilai adat dan budaya ternate.
4	Maulidya dan Alfirdaus, 2019	Diskontinuitas kota kreatif pekalongan dalam perspektif <i>collaborative governance</i>	Hasil penelitian proses kolaborasi dalam mewujudkan kota pekalongan sebagai kota kreatif tidak terjadi karena prosesnya yang memang tidak sederhana. Tidak cukup hanya melihat peran dan hubungan, tetapi aspek politis sebagai bentuk rasionalitas.

5	Putu Nomy Yasintha, 2020.	<i>Collaborative governance</i> dalam kebijakan pembangunan pariwisata di kabupaten Gianyar.	Dari hasil penelitian dimana pengelolaan pada kebun raya tematik Gianyar masih hanya mengandalkan pemerintah saja, kontribusi dari pihak swasta masih kurang atau minimal. Selain itu belum terdapat aturan yang jelas dari pihak desa adat sehingga masyarakat belum mempunyai peran yang jelas dalam pengelolaan kebun raya tematik Gianyar.
6	Cintatya Adhita Dara Kirana dan Rike Anggun Artisa, 2020	Pengembangan desa wisata berbasis <i>collaborative governance</i> di kota batu.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan desa wisata pemerintah kota batu melibatkan sector swasta, akademis, media dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan. Adapun dalam pelaksanaan <i>collaborative governance</i> tersebut dibutuhkan komunikasi yang efektif guna memudahkan para aktor melakukan kolaborasi sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam pengembangan desa wisata.
7	Permatasari, Elise Dwi dan Firda Hidayat, 2021	Analisis Penyelenggaraan program festival dalam pelestarian budaya dengan perspektif <i>collaborative governance</i> (studi kasus pada festival reyog nasional di kabupaten ponorogo)	Pada penelitian ini penerapan prinsip <i>collaborative governance</i> dalam pelaksanaan program reyog nasional di kabupaten ponorogo yaitu adanya partisipasi pemerintah dan non-pemerintah dalam pelaksanaan programnya sebagai wujud pengembangan dan melestarikan budaya. <i>akseptasi</i> yang artinya ada suatu perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah dengan para pegiat budaya.
8	Muhammad Qur'anul kariem, Afrijal, 2021	<i>Collaborative</i> pada revitalisasi sungai sekanak di kota Palembang.	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah tidak menerapkan pemerintahan kolaboratif dalam revitalisasi sungai sekanak di kota

			Palembang, hal tersebut terjadi karena pendekatan yang sangat teknokratis yang digunakan pemerintah dalam kebijakan revitalisasi sungai sekanak.
9	Mahardhika Berliandaldo, Angga Wijaya Holman Fasa, 2022	Pengelolaan Geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi: perspektif <i>collaborative governance</i> .	Hasil penelitian ini dalam kerangka kolaboratif, dan perlu ditunjang oleh system kelembagaan yang jelas, khususnya untuk mengelola keuangan dan pendapatan, manajemen fasilitas, masalah teknis, mengurus system manajemen harian, regulasi kolaborasi actor seperti bisnis local, akademis, pengusaha, pemerintah daerah, badan pariwisata dan masyarakat setempat.
10	Delta Pramesti, Eko Budi Sulistio, Dewie Brima Atika, 2022	Model Pengembangan potensi pariwisata dalam perspektif <i>Collaborative governance</i> (Studi di taman wisata alam wira garden)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan potensi pariwisata di taman wisata alam wira yaitu: Pertama, <i>Face to face</i> Kedua, <i>Trust building</i> Ketiga, <i>Commitment to process</i> Keempat, <i>Share understanding</i> .

Sumber: Peneliti, 2022.

Hubungan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang *Collaborative governance* secara tidak langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. perbedaan penelitian ini terletak pada judul penelitian, lokasi dan metode penelitian. Dari beberapa penelitian yang sudah banyak mengangkat tema tentang *Collaborative Governance*. Dari tulisan yang di buat oleh

beberapa penulis diatas terdapat berbagai persamaan dan perbedaan yang dapat dibuat sebagai bahan acuan terhadap penelitian.

Dimana dari penelitian tersebut bersama-sama berfokus membahas tentang *Collaborative governance* yang mana dalam melestarikan dan memperkenalkan budaya yang ada di daerah sebagai bentuk memperkenalkan budaya yang menjadi ciri khas daerahnya dan kolaborasi dari pemerintah daerahnya. Dan persamaan pada Penelitian tersebut dalam proses *Collaborative governance* antara tiga actor dalam permasalahan public yang dihadapi diperlukannya usaha dalam meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Serta persamaan lebih menguatamakan program-program dari pelaksanaan dalam *Collaborative governance*.

Dalam perbedaan penelitian di atas hanya terdapat pada lokasi yang tentunya berbeda pada setiap daerahnya, serta metode yang digunakan penelitian diatas berbeda-beda, namun metode kualitatif lebih banyak digunakan pada penelitian-penelitian tersebut.

#### **4. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian ini merupakan hasil analisis dari tema-tema terkait dalam penelitian. Kerangka teori dapat menambah referensi serta pemahaman terhadap topic kepada peneliti ataupun terhadap permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian.

### ***1. Collaborative Governance***

*Governance* berasal dari kata “*govern*” dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Dengan demikian secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non pemerintah. (Iskandar et al., 2021)

*Governance* adalah proses pembuatan kebijakan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan melibatkan negara (pemerintah), sektor privat maupun masyarakat madani dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. (Dewi, 2019)

Terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses *governance*. Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah. melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif. Masyarakat dan diberikan ruang. Akan percuma apabila sebenarnya masyarakat memiliki niatan yang kuat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi tidak diberikan ruang. Keterlibatan

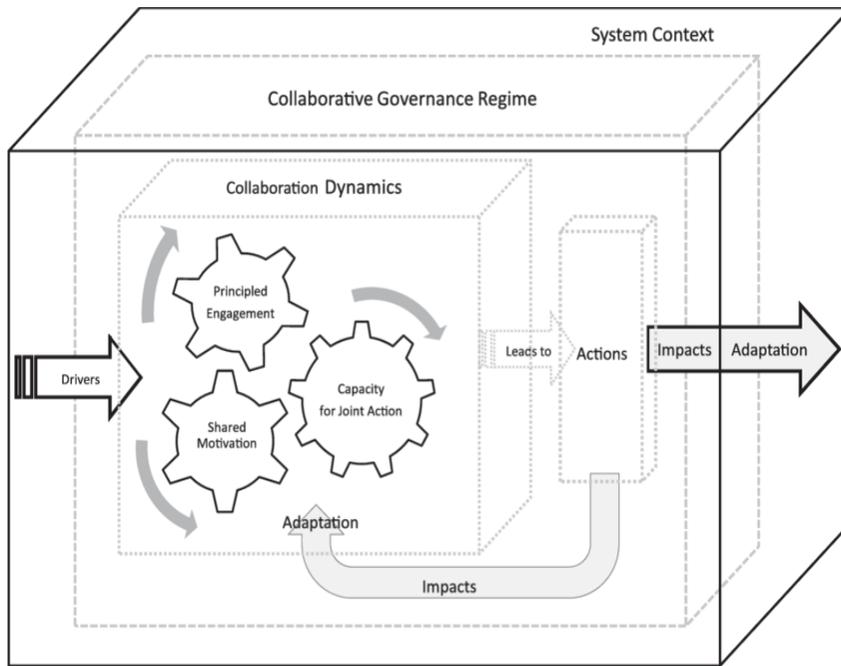
masyarakat ini mampu membuat masyarakat yang mandiri dan meningkatkan kualitas masyarakat ke depannya. (Iskandar et al., 2021)

Dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang oriteratif. Komponen tersebut antara lain : Penggerakan prinsip bersama (*Principled engagement*), Motivasi bersama (*shared motivation*) dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*). (Emerson, 2012)

Teori proses kolaborasi atau *Collaborative Governance Regime* (CGR) menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus, dengan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara, sebelum mengarah pada dampak utama, serta adaptasi terhadap dampak sementara.

Komponen dalam CGR untuk mengungkap fenomena kolaborasi. Berbagai komponen yang menjadi proses kolaborasi diantaranya adalah 1) dinamika kolaborasi, 2) tindakan-tindakan kolaborasi, dan 3) dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi.

Gambar 1.1 Teori *Collaborative Governance* menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh.



Sumber: Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012.

1. Penggerakan prinsip bersama (*Principled engagement*)

Penggerakan prinsip bersama merupakan hal yang terjadi terus-menerus dalam kolaborasi. Beberapa hal seperti dialog tatap-muka, atau melalui perantara teknologi adalah cara untuk menggerakkan prinsip bersama. Di dalam komponen ini terdapat penegasan kembali tujuan bersama, pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip

bersama, yang sering diungkap dalam berbagai perspektif aktor yang terlibat. Oleh karena itu, penyatuan prinsip merupakan inti dari hal ini.

Karakteristik masing-masing aktor, merupakan elemen kunci yang mempengaruhi seberapa baik prinsip bersama berjalan. Langkah awal kritis adalah bagaimana pemerintah memilih aktor yang akan terlibat dalam kolaborasi. Selanjutnya, setelah kolaborasi berkembang, penambahan aktor pun dimungkinkan. Kemudian barulah kegiatan penggerakan prinsip bersama terwujud, yang dapat dijelaskan dalam tiga elemen berikut:

1) Pengungkapan (*Discovery*)

Mengungkap kepentingan masing-masing aktor, nilai-nilai aktor, Serta upaya konstruksi kepentingan bersama. Pengungkapan baik pada aktor kolaborasi, dan individu di dalamnya, dapat dianalisis dari kepentingan aktor tersebut bergabung di dalam kolaborasi. Analisis kemudian melihat dari seberapa besar dampak dan implikasi yang ditimbulkan, yaitu apakah terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan sehingga mempengaruhi proses berkolaborasi. Efektivitas penggerakan prinsip bersama ditentukan oleh kualitas masing-masing dan proses interaktif dari tiga hal tersebut.

2) Deliberasi (*deliberation*).

Penekanan tidak hanya pada terbentuknya deliberasi, namun lebih kepada bagaimana “kualitas deliberasi” karena kolaborasi seringkali terjadi perbedaan

pemikiran, perspektif, dan kepentingan yang muncul setiap saat. Membangun deliberasi yang berkualitas, memerlukan keahlian advokasi, tidak harus pada semua individu, namun sebagian saja sudah cukup. Advokasi ini bersifat internal, artinya untuk mengarahkan kolaborasi, serta aktor agar tetap berjalan pada tujuan kolaborasi, menghasilkan resolusi konflik secara strategis dan efektif.

Beberapa hal analisis deliberasi di atas, secara implisit berusaha untuk mendapat jawaban mengenai keberanian para aktor untuk bertindak leluasa dalam kolaborasi, ada atau tidaknya tekanan dari pihak pemerintah sehingga membatasi tindakan kolaborasi, atau ada paksaan harus berbuat demikian. Adanya proses demokrasi delibratif, sehingga mampu membuat kolaborasi menjadi wadah untuk mengembangkan inovasi dan kreasi, baik dalam memunculkan ide, maupun dalam menghadapi praktek kegiatan kolaborasi di lapangan, yaitu apabila ditemukan permasalahan tak terduga, maka setiap aktor tidak takut akan bertindak kreatif, karena tidak ada tekanan untuk harus bertindak sesuai yang diperintahkan.

### 3) Determinasi (*determinations*).

Merupakan serangkaian determinasi, yaitu tindakan penetapan akan maksud tujuan yang diinginkan, yang dibedakan menjadi primer dan substantif.

a. Determinasi primer: beberapa keputusan prosedural (misalnya: agenda setting kolaborasi, menjadwalkan diskusi, membentuk kelompok kerja).

b. Determinasi substantif: hasil produk kolaborasi (misalnya: pencapaian kesepakatan bersama, rekomendasi final tindakan kolaborasi).

Dalam kolaborasi yang sedang berlangsung, lebih banyak determinasi substantif yang dibuat secara terus-menerus, karena sifatnya lebih dibutuhkan. Sedangkan melihat dari praktisnya, determinasi dapat diwujudkan melalui pembentukan konsensus sebagai metode fundamental dalam pembentukan determinasi bersama. Kesimpulannya, pergerakan prinsip bersama dibentuk dan dipertahankan keberadaannya oleh proses interaktif dari pengungkapan, deliberasi, semua stakeholders menyetujui tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Sedangkan, mutual understanding lebih ke arah pemahaman bersama yang dimaksud untuk membuat sesama stakeholder saling mengerti dan menghargai posisi dan kepentingan stakeholder lain bahkan ketika stakeholder tersebut tidak sependapat. Pemahaman bersama menuju pada kualitas interaksi interpersonal individu dan organisasi. Pembentukan pemahaman bersama sering dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk di dalam kolaborasi.

## 2. Motivasi Bersama (*Shared Motivation*)

Motivasi bersama menekankan pada elemen interpersonal dan relasional dari dinamika kolaborasi yang kadang disebut sebagai modal sosial. Komponen ini diinisiasi oleh pergerakan prinsip bersama yang merupakan hasil jangka menengah.

Motivasi bersama sebagai siklus penguatan diri yang terdiri dari empat elemen saling menguntungkan diantaranya: kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen. Penjelasan sebagai berikut:

#### 1) Kepercayaan Bersama (*Mutual Trust*)

Kepercayaan bersama akan berkembang seiring dengan keterlibatan pihak-pihak pada saat melakukan kolaborasi, mengenal satu sama lain dan saling membuktikan bahwa diri mereka dapat dipercaya, bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Kepercayaan merupakan bagian penting dan mutlak dalam kemajuan kolaborasi. Sebagai contoh, dalam sebuah kerjasama, kepercayaan sangat berperan penting dalam mengurangi biaya transaksi, meningkatkan nilai investasi dan menjaga stabilitas dalam hubungan serta merangsang pembelajaran bersama, pertukaran pengetahuan dan inovasi.

Dalam hal ini kepercayaan dikonseptualisasikan sebagai mekanisme yang akan menghasilkan rasa saling mengerti antar stakeholder yang pada akhirnya akan melahirkan legitimasi bersama dan bermuara pada adanya komitmen bersama. Kepercayaan memungkinkan individu atau kelompok untuk mengesampingkan urusan individu atau kelompok mereka demi memahami kepentingan, kebutuhan, nilai dan tujuan bersama.

## 2) Pemahaman Bersama (*Mutual Understanding*)

Mutual understanding lebih ke arah pemahaman bersama yang dimaksud untuk membuat sesama stakeholder saling mengerti dan menghargai posisi dan kepentingan stakeholder lain bahkan ketika stakeholder tersebut tidak sependapat. Pemahaman bersama menuju pada kualitas interaksi interpersonal individu dan organisasi. Pembentukan pemahaman bersama sering dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk di dalam kolaborasi.

## 3) Legitimasi Internal (*Internal Legimation*)

Legitimasi internal merupakan pengakuan yang berasal dari internal kolaborasi. Dalam hal ini aktor-aktor dalam berkolaborasi dituntut untuk dapat dipercaya, dan kredibel terhadap kepentingan bersama. Aktor-aktor kolaborasi harus menyadari bahwa ada rasa ketergantungan antar aktor yang akan menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan.

Legitimasi internal, pemahaman bersama, dan kepercayaan bersama merupakan tiga elemen yang saling terkait erat satu sama lain dalam komponen motivasi bersama, sehingga untuk elemen selanjutnya, yaitu komitmen juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kualitas tiga elemen.

#### 4) Komitmen (*Commitment*)

Adanya komitmen pada proses kolaborasi mampu menghilangkan penghambat yang seringkali muncul karena perbedaan karakteristik dan kepentingan antar aktor.

Komitmen membuat para aktor berinteraksi lintas organisasi sehingga terbentuk komitmen bersama. Analisis kualitas pembentukan komitmen pada setiap aktor kolaborasi, dapat melihat dari tujuan bergabung di dalam kolaborasi, yaitu apakah ada kepentingan bersama yang telah bertemu, sehingga mempengaruhi keaktifan daripada aktor tersebut untuk berpartisipasi di dalam kolaborasi.

Selain itu, adanya sikap optimis akan tercapainya tujuan kolaborasi, dan semangat untuk melakukan kegiatan kolaborasi dengan aktor lain juga membentuk komitmen. Adanya hasil baik sementara dari kolaborasi atau “small-wins” dan insentif yang baik juga seringkali mempengaruhi perubahan komitmen aktor kolaborasi.

Kesimpulannya, adanya interaksi yang berkualitas membentuk kepercayaan bersama dan pengertian bersama, sehingga tercipta pengakuan legitimasi internal, yang mempengaruhi komitmen bersama. Keempat hal tersebut berkembang dan saling mempengaruhi, sehingga menciptakan motivasi bersama tetap berlangsung.

### 3. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*)

Dalam hal ini, kapasitas untuk melakukan tindakan bersama dikonseptualisasikan dalam kerangka yang merupakan kombinasi dari empat elemen penting diantaranya: prosedur dan kesepakatan institusi, kepemimpinan, pengetahuan dan sumber daya. Elemen-elemen tersebut harus memadai dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama seringkali dipandang sebagai hasil dari interaksi penggerakan prinsip bersama dan motivasi bersama. Namun perkembangan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama juga dapat memperkuat motivasi bersama dan penggerakan prinsip bersama yang memastikan tindakan dan dampak kolaborasi yang lebih efektif. Selanjutnya, elemen-elemen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Prosedur dan kesepakatan insitisi (*procedural and insitutional arrangements*)

Berbagai prosedur dan protokol, serta struktur kolaborasi dibutuhkan dalam manajemen interaksi antar aktor. Sedangkan dimensi-dimensi dari kesepakatan bersama adalah aturan-aturan umum (*ground rules*), protokol-protokol dalam kegiatan (*operating protocol*), peraturan untuk membuat keputusan (*decision rules*), dan sebagainya yang mungkin dapat terbentuk. Seringkali kesepakatan yang ada dalam kolaborasi awalnya adalah informal, namun seiring berjalannya waktu, maka dibutuhkan formalitas, seperti adanya

pembentukan perundangan atau legalformal yang menjadi payung hukum berkolaborasi.

Untuk kolaborasi yang lebih besar, lebih kompleks, dan berdurasi panjang, maka struktur insitusi kolaborasi harus jelas, dan protokol-protokol untuk administrasi serta manajemen kegiatan kolaborasi diperlukan. Sedangkan kesepakatan institusi (*institutional arrangements*), terdapat pada intra-organisasi (bagaimana aktor melakukan *governing* dan memajemen organisasinya sendiri dalam inisiatif berkolaborasi), serta inter-organisasi (bagaimana grup kolaborasi memajemen proses, serta bagaimana kolaborasi berintegrasi dengan pembuat keputusan dari pihak luar).

Stuktur kolaborasi yang baik adalah fleksibel dan tidak hirarki. Stuktur bersifat jejaring, dengan variasi yang berbeda, biasanya pilihan umum yang digunakan adalah “*self-managing system*” dengan kepemimpinan dari aktor pemerintah, atau membuat struktur yang benar-benar baru. walaupun kolaborasi berbentuk fleksibel dan tidak hirarki, namun peraturan masih merupakan hal penting yang dibutuhkan.

## 2) Kepemimpinan (*leadership*)

Kepemimpinan memegang peranan penting yang mutlak dalam kolaborasi. Berbagai peran pemimpin selama proses kolaborasi adalah (1) sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi, (2) penginisiasi pertemuan, (3)

fasilitator dan mediator, (4) representasi dari aktor, dan kolaborasi secara keseluruhan, (5) pendistributor pengetahuan, (6) mendorong penggunaan teknologi dalam kolaborasi, serta (7) melakukan advokasi pada publik. Peran pemimpin lain yang utama adalah bagaimana tindakannya saat mendorong deliberasi atau mengatasi konflik, dan bagaimana meningkatkan determinasi para aktor terhadap tujuan kolaborasi (dilakukan selama proses kolaborasi berlangsung).

Seringkali pemimpin kolaborasi tidak mampu menjalankan perannya dengan baik, karena ketidaktahuan akan skills yang harus mereka kuasai, atau bahkan mereka tidak mengetahui bahwa kepemimpinan yang dibutuhkan dalam kolaborasi berbeda dengan kepemimpinan pada organisasi secara umum.

### 3) Pengetahuan (*knowledge*)

Merupakan mata uang atau dari kolaborasi. Pengetahuan adalah apa saja yang dibutuhkan dan berusaha untuk disediakan. Pengetahuan adalah kombinasi dari informasi dengan memahami informasi itu dan menambah kapabilitas. Pengetahuan membawa pada tindakan, namun pengetahuan juga dapat menginformasi atau membingungkan.

### 4) Sumber daya (*resources*)

Adanya pertukaran maupun penggabungan sumber daya merupakan salah satu keuntungan kolaborasi. Sumber daya adalah pendanaan finansial, pembagian waktu dan peran, dukungan teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan, saling

melakukan pendampingan, kebutuhan keahlian analisis kolaborasi, dan implementor di lapangan, serta kebutuhan ahli.

Dalam kolaborasi selalu terjadi perbedaan besar sumber daya antar aktor (*resource disparities*). Pengukuran efektivitas sumber daya dilihat dari bagaimana kemampuan unsur-unsur kolaborasi (pemimpin, aktor, dan individu) melakukan manajemen sumber daya berdasarkan perbedaan tersebut.

Dalam prakteknya sangat rumit dan tidak mudah, karena dipengaruhi oleh elemen lain, yaitu adanya prosedur dan kesepakatan institusi yang dibuat apakah memadai hal tersebut, bagaimana peran pemimpin dan distribusi pengetahuan yang ada mendorong pertukaran sumber daya dan apakah kolaborasi membentuk mekanisme manajemen sumber daya tersebut.

Pada dasarnya, kapasitas untuk melakukan tindakan bersama merupakan hal krusial dan merupakan tantangan utama kolaborasi, karena selalu terdapat perbedaan karakteristik dan kekuatan antar aktor. Kejelasan prosedur dan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk legal-formal, pengaruh kepemimpinan, manajemen pengetahuan, serta manajemen sumber daya merupakan elemen-elemen yang mempengaruhi baik tidaknya kapasitas dari para aktor, sehingga menjadi mampu melakukan tindakan bersama. Namun, melihat penjelasan pada masing- masing elemen, terdapat pengaruh yang muncul dari komponen sebelumnya, yaitu penggerakan prinsip bersama, dan motivasi bersama.

Kesimpulan akhir dari dinamika kolaborasi ini adalah baik tidaknya dinamika ditentukan oleh tiga komponen, yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen. Dinamika yang ada berbentuk siklus, dimana masing-masing komponen saling mempengaruhi (begitu juga elemen-elemennya, dan tidak dipungkiri bahwa elemen tersebut dapat mempengaruhi elemen lintas-komponen). (Emerson, 2012)

Kerjasama kolaboratif terjadi penyamaan visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara para pihak tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasi walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama (Dewi, 2019)

*Collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007:544) adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non-state* didalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan *deliberatif* yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset.

*Collaborative governance* adalah proses dan struktur yang melibatkan berbagai pihak melintasi batas-batas organisasinya. Kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang formal, aktif, *eksplisit* dan berorientasi kolektif

dalam manajemen dan kebijakan publik. Adapun nilai dasarnya yakni orientasi konsensus dalam pengambilan keputusan (tujuan), kepemimpinan kolektif dalam kelembagaan (struktur), komunikasi multiarah dalam hubungan kemanusiaan (interaksi) dan berbagi sumber daya dalam aksi (proses). Nilai dasar tersebut menjadi satu kesatuan yang terintegrasi pada setiap tahapan kebijakan public (Atmajaya, 2016)

Dalam *Collaborative governance* terdapat beberapa dimensi yaitu:

1. Dalam tujuan mencapai sasaran klien terdapat kolaborasi yang juga dapat meningkatkan sumber daya dan juga pelayanan.
2. Jika hubungan antar organisasi meningkat dapat mencapai tujuan untuk mendapatkan manfaat kolektif dan kolaborasi organisasi yang baik yang berujung dengan peningkatan modal social masyarakat yang dilayani. Dalam hubungan organisasi yang berkualitas dapat membantu dalam menghadapi berbagai masalah hingga mendapat solusi yang maksimal.
3. Perkembangan yang terjadi di organisasi dapat membawa efek langsung yang lebih baik dan mampu untuk meningkatkan kolaborasi. (Dewi, 2019)

Pada masa yang maju ini pemerintah perlu melakukan berbagai inovasi dalam menentukan efektivitas kebijakan yang dibuatnya di berbagai kasus yang dihadapi, tentunya perlu meningkatkan kerjasama antar pihak yang mana dapat memudahkan serta meningkatkan efektivitas hasil yang di bangun, berbagai kepentingan yang hadir

tentunya banyak melibatkan berbagai pihak oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang biasa di sebut dengan *Collaborative governance*.

*Collaborative governance* terdiri dari beberapa actor yang ikut andil dalam kolaborasi ini, seperti pemerintah, swasta serta masyarakat. Karena memang dalam hal menentukan kebijakan maupun meningkatkan kolaborasi tidak hanya dikerjakan oleh satu pihak. Perlu pihak lain untuk bekerjasama dengan langkah-langkah yang benar sesuai langkah-langkah yang ada sebelumnya dalam *Collaborative governance*.

## **2. Pelestarian Batik Trusmi**

Pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif (Apouw et al., 2017)

Kegiatan pelestarian dan kelestarian adalah upaya untuk membuat sesuatu tetap selama-lamanya tidak berubah yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu, guna mewujudkan tujuan tertentu di aspek stabilisasi manusia, serta kegiatan pencerminan dinamika seseorang. (Apouw et al., 2017)

Batik adalah salah satu cara pembuatan bahan pakaian. Selain itu batik merupakan *ikhwal kriya* tekstil yang tidak asing bagi orang Indonesia, bahkan dijadikan sebagai simbol bangsa Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, batik adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam (lilin) pada kain, kemudian diproses dengan cara tertentu. (Wahyuningsih, 2020)

Batik Trusmi merupakan karya budaya yang keberadaannya sampai sekarang masih diterima oleh masyarakat. Batik trusmi merupakan salah satu batik yang sangat terkenal di Indonesia yang merupakan khas Cirebon. Kata batik sendiri berasal dari bahasa jawa. Secara etimologi kata batik diambil dari kata *ambatik* yaitu gabungan dari kata *amba* dalam bahasa jawa yang berarti menulis dan *tik* yang berarti titik kecil, tetesan, atau membuat titik. Jadi, batik adalah menulis atau menulis titik. (Wahyuningsih & Fauziah, 2016)

## **5. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain. Definisi dalam penelitian ini adalah:

### **a. *Collaborative Governance***

*Collaborative governance* adalah usaha dari pemerintah dalam rangka mengatasi masalah public dengan cara bekerjasama atau melakukan kemitraan dengan masyarakat, instansi swasta lain untuk meningkatkan kualitas dari hasil program atau kegiatan yang dilakukan. Dengan artian, program atau kegiatan yang dilakukan bersama ini dapat mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama.

## **b. Pelestarian Batik Trusmi**

Upaya melalui proses dan mempunyai cara untuk menjaga, melindungi, dan juga mengembangkan sesuatu agar tidak punah dan terus bertahan. Batik trusmi merupakan batik yang terkenal dan menjadi ciri khas kota Cirebon. Terdapat motif batik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Batik Trusmi Cirebon, salah satu kerajinan khas Cirebon yang terkenal di Indonesia.

## **6. Definisi Operasional**

Agar variable dalam penelitian ini dapat diukur dan diamati, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu definisi operasional. Definisi operasional merupakan unsur penting dalam penelitian, karena melalui definisi operasional maka peneliti dapat menyusun dan membuat alat ukur data yang tepat dan akurat.

Oleh karena itu, untuk memberikan kemudahan dalam proses pengukuran variable penelitian ini adalah *Collaborative governance*, Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah proses yang melibatkan *stakeholders* mulai dari Pemerintah, Sector swasta dan Masyarakat di dalam Pelestarian Batik Trusmi di Kabupaten Cirebon.

Proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang oriteratif. Tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi. Komponen tersebut antara lain: Penggerakan prinsip bersama (*Principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*) dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*)

### 1.1 Tabel Definisi operasional

<b>Variable</b>	<b>Indicator</b>	<b>Parameter</b>
<i>Collaborative Governance</i>	1. Pergerakan Prinsip Bersama ( <i>Principle Engagement</i> )	a. pengungkapan, mengungkap nilai-nilai serta upaya konstruksi kepentingan bersama. b. Deliberasi, mengarahkan kolaborasi, serta aktor agar tetap berjalan pada tujuan kolaborasi. c. Determinasi, tindakan penetapan akan maksud tujuan yang diinginkan
	2. Motivasi Bersama ( <i>Shared Motivation</i> )	a. Kepercayaan bersama, bagian penting dan mutlak dalam kemajuan kolaborasi. b. Pemahaman bersama, membuat stakeholder mengerti dan menghargai posisi kepentingan stakeholder. c. Legitimasi internal, actor dituntut untuk dapat dipercaya terhadap kepentingan bersama. d. Komitmen, mampu menghilangkan penghambat yang muncul karena perbedaan
	3. Kapasitas Untuk Melakukan Tindakan Bersama ( <i>Capacity For Joint Action</i> )	a. Prosedur dan kesepakatan institusi, berbagai prosedur dan protokol serta struktur kolaborasi dibutuhkan dalam manajemen interaksi antar actor. b. Kepemimpinan, memegang peranan penting dan mutlak dana kolaborasi. c. Pengetahuan, kombinasi dari informasi dengan memahami informasi dan menambah kapabilitas. d. Sumber daya, pendanaan finansial, pembagian waktu dan peran.

## **7. Metodologi Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, untuk menentukan berhasilnya suatu penelitian atau tidaknya semua tergantung dari metodologi, oleh karena itu setiap peneliti harus menggunakan metodologi sebagai arah berfikir yang sistematis agar dapat mendapatkan hasil yang baik secara ilmiah.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa kualitatif. Data kualitatif dikumpulkan dan diperoleh dari kata-kata, gambar daripada angka-angka. Data tersebut dapat berupa hasil wawancara, catatan lapangan, ataupun jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian. Penelitian kualitatif bisa diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berarti sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melakukan situasi dan keadaan suatu objek penelitian seperti perorangan, lembaga, masyarakat dan lain-lain. Selain itu, penelitian deskriptif dimaksud agar mampu membuat gambaran yang sistematis, factual dan akurat yang bersangkutan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan.

Penelitian kualitatif bisa diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berarti sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan situasi dan keadaan suatu objek penelitian seperti perorangan, lembaga, masyarakat, dan lain-lain.

Selain itu, peneliti kualitatif deskriptif dimaksud agar mampu membuat gambaran yang sistematis, factual dan akurat yang bersangkutan dengan fakta-fakta, sifat serta hubungan antar beberapa fenomena yang diteliti.

Selain itu juga terdapat ciri-ciri dalam penelitian deskriptif, adalah merumuskan pemecahan masalah yang ada pada saat ini atau masalah-masalah actual dan data-data yang dikumpulkan harus dijelaskan dan dianalisa. Oleh karena itu, penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada saat itu juga atau masalah-masalah actual berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertepatan di kawasan kampung batik Trusmi, kawasan ini terletak di Plered, Kabupaten Cirebon.

Lokasi penelitian dipilih karena lokasinya yang mudah dijangkau oleh peneliti dan lokasi penelitian ini dipilih karena memang bisa di bilang kawasan batik Trusmi ini merupakan pelopor batik nusantara yang sangat dikenal di Cirebon, Dengan lokasi yang dipilih tersebut maka peneliti bisa memperkenalkan batik trusmi sebagai *ikon* dari kota Cirebon.

### **3. Data dan Sumber Data**

Dalam suatu penelitian tentunya penting untuk memiliki data yang akurat agar mampu memberikan informasi yang pasti terhadap suatu yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kedua jenis data untuk mendukung penelitian.

#### **A. Data Primer**

Data primer ini merupakan data yang didapat melalui proses terjun lapangan atau bisa dibidang dengan peneliti datang langsung ke tempat dimana peneliti tersebut akan melakukan penelitian.

Data primer jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey, eksperimen. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi ke tempat yang menjadi studi kasus agar mampu mendapatkan data yang berasal langsung dari sumbernya. Data dalam bentuk kolaborasi pada dasarnya adalah bentuk kerjasama, interaksi dan kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung yang menerima sebab akibat dan manfaatnya.

##### **1)Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan kepala Desa kawasan kampung batik Trusmi, Pengusaha batik trusmi, Pengerajin batik trusmi, dan Masyarakat kampung batik Trusmi.

Wawancara dalam hal ini mengenai *Collaborative governance* dalam melestarikan batik Trusmi di kabupaten Cirebon.

Untuk memperoleh data yang akurat dibutuhkan wawancara terhadap narasumber agar dapat memperoleh situasi yang nyata yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini. Teknik yang dilakukan dalam wawancara untuk penelitian kualitatif yaitu wawancara mendalam, karena teknik wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan keterangan untuk tujuan dengan Tanya jawab sekaligus bertatap muka antara pewawancara dan informan.

Peneliti akan turun langsung ke daerah penelitian untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara. Dari proses wawancara peneliti berharap untuk mendapatkan data seperti, bagaimana *Collaborative governance* dalam melestarikan batik Trusmi di kabupaten Cirebon ataupun lainnya di tentukan berdasarkan siapa yang penulis temui di lokasi.

## **2)Observasi**

Teknik pengumpulan data dengan observasi merupakan teknik pengambilan langsung data lapangan. Teknik ini untuk mengamati langsung hasil dari kolaborasi yang dilakukan antara tiga actor di konsep *Collaborative governance* dalam pelestarian batik Trusmi di kabupaten Cirebon.

Setiap hal yang ada pada lokasi penelitian ini akan di amati dari awal hingga akhir agar penulis dapat mengamati bagaimana proses kolaborasi dalam melestarikan batik Trusmi ini.

## **B. Data Sekunder**

Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber yang ada, misalnya berupa dokumen, buku, jurnal, situs-situs internet, dan instansi-instansi yang terkait, serta data lainnya yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian ini.

### **1) Dokumentasi**

Dokumentasi sangatlah penting sebagai bukti nyata dan mampu menambah pengetahuan baik itu berupa dokumentasi berbentuk tertulis maupun gambar yang didapat selama melakukan penelitian. Metode dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non manusia.

Dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan hal yang memiliki sifat induktif, yaitu sebuah analisis yang diambil dari data pada saat terjun ke objek penelitian, yang dengan langkah selanjutnya di kembangkan untuk menjadi lebih hipotesis, yang dari hipotesis yang di dapat ditambah lagi dengan data-data yang diperoleh sampai suatu hal tersebut mampu diterima.

Teknik analisis data adalah berbagai data yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara lapangan, dengan studi kepustakaan dan analisis dokumentasi yang diartikan agar mengetahui maksud dan tujuan dari penelitian tersebut. Hal ini dapat dihubungkan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Yang akan berujung dengan data yang terkumpul dan disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung hasil wawancara tersebut.

##### **1) Pengumpulan Data**

Pengumpulan data ini adalah proses dan kegiatan dalam mengumpulkan data dari semua sumber yang tersedia, baik yang diambil dari data primer ataupun sekunder. Ditambah dengan memindahkan berbagai hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dalam bentuk transkrip serta juga memindahkan dokumen dalam bentuk deskriptif ataupun tabel.

## **2)Reduksi Data**

Reduksi data atau merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Hasil rangkuman tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

## **3)Penyajian Data**

Penyajian data merupakan urai singkat, bagan hubungan antar kategori, flowehart dan sejenisnya yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk uraian berupa kata-kata berbentuk teks naratif.

## **4)Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, seperti telah dipaparkan bahwa masalah dan permusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.